

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta antara sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial terdapat perbedaan yang signifikan dari kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta antara sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Hal ini berarti pemda DKI memang benar-benar cermat dalam mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah karena sesudah Otonomi Daerah Pemda DKI Jakarta mampu meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD, sehingga kontribusinya lebih besar sesudah Otonomi Daerah dari sebelum Otonomi Daerah, dimana baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah Pajak daerah yang memiliki kontribusi besar adalah PKB dan BBNKB.
2. Secara parsial tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Hal ini berarti dengan ekstensifikasi retribusi yang dilakukan Pemda DKI belum mampu memaksimalkan kontribusi Retribusi

sesudah otonomi daerah. Meskipun kontribusinya rendah, namun retribusi daerah yang memiliki kontribusi terbesar sebelum otonomi daerah adalah retribusi kesehatan, retribusi parkir dan retribusi rekreasi. Sedangkan sesudah otonomi daerah retribusi terbesar berasal dari retribusi perizinan tertentu.

3. Secara simultan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Hal ini berarti jika secara simultan variabel-variabel yang memberikan kontribusi terhadap PAD belum mampu memberikan kontribusi maksimal meskipun Pemerintah Pusat sudah memberikan kemudahan kepada setiap daerah termasuk Pemda DKI dalam hal mengelola PAD.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini terbukti terdapat perbedaan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD antara sebelum dan sesudah Otonomi Daerah, namun tidak demikian dengan kontribusi Retribusi Daerah dan kontribusi keduanya terhadap PAD.

Berdasarkan perhitungan hasil uji beda dua proporsi dapat dilihat bahwa antara dua variabel yang mempengaruhi PAD tersebut yang memiliki kontribusi paling besar adalah Pajak Daerah yaitu sebelum otonomi daerah sebesar 783,21%, sesudah otonomi daerah sebesar 830,01% dan diikuti dengan kontribusi Retribusi Daerah yaitu sebelum otonomi daerah sebesar 119,51% dan sesudah otonomi daerah sebesar 55,96%.

## **B. Implikasi**

Implikasi yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya otonomi daerah Pemda DKI mengadakan ekstensifikasi retribusi daerah dan mengadakan intensifikasi pada pajak daerah, dengan adanya kebijakan tersebut kontribusi pajak daerah lebih besar sesudah otonomi daerah daripada sebelum otonomi daerah, berbanding terbalik dengan yang terjadi dengan retribusi daerah.
2. Dengan keadaan SDA DKI yang tidak melimpah, maka Pemda berupaya meningkatkan PAD melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu dua sumber PAD ini merupakan sumber yang diandalkan oleh setiap Pemerintah Daerah di Indonesia khususnya Pemerintah DKI Jakarta demi terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, Pemda yang memiliki Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tinggi maka Pemerintah Daerah tersebut akan mampu meningkatkan PAD yang berujung pada peningkatan kemandirian keuangan daerah tersebut.
3. Penerimaan Retribusi Daerah berbanding terbalik dengan Pajak Daerah. Dibandingkan sebelum otonomi daerah kontribusi Retribusi Daerah lebih rendah sesudah otonom daerah. Permasalahan yang dihadapi Pemda DKI yang sampai saat ini masih ada dan Pemda DKI selalu berupaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut karena apabila permasalahan ini terus berlanjut maka Pemda DKI dapat dikatakan tidak mampu memaksimalkan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal pemungutan

Retribusi Daerah. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan oleh Pemprov DKI, oleh karena itu harus segera diperbaiki.

Baik buruknya suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari tinggi PAD yang dapat diperoleh dari daerah tersebut. Untuk itulah Pemerintah Daerah harus berupaya untuk meningkatnya PAD agar dapat menjalankan kegiatan pemerintahan dengan baik, terutama dalam hal peningkatan dan perbaikan pelayanan publik.

### **C. Saran**

Ada dua bagian besar yang menjadi perhatian peneliti. Perhatian pertama menuju bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Perhatian ke dua ditujukan untuk peneliti selanjutnya.

Dalam penelitian ini peneliti memiliki banyak keterbatasan perihal obyek yang diteliti hanya terbatas hanya satu wilayah yaitu DKI Jakarta saja. Hal lain yang juga sama pentingnya adalah terdiferensiasinya hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesimpulannya masing-masing.

Atas dasar tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang selalu berupaya untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerahnya agar dapat menyeimbangkan sumber-sumber pendapatan lainnya, tidak hanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saja yang menjadi andalan bagi Pemprov DKI. Untuk Pajak Daerah, Pemda harus mampu menggali potensi objek pajak lainnya selain PKB dan

BBNKB. Untuk Retribusi Daerah, Pemda DKI seharusnya mampu mengelola tempat rekreasi yang aman dan nyaman agar mampu meningkatkan kontribusi retribusi daerah. Begitu pula dengan pelayanan umum lainnya yang dapat memberikan kontribusi besar bagi retribusi daerah.

2. Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah Pemprov DKI hendaknya lebih memperketat pengawasan pemungutan Retribusi agar uang Retribusi yang sudah dibayarkan oleh masyarakat benar-benar masuk ke Pemerintah dan bukan sebagai pemasukan bagi oknum-oknum tertentu.
3. Meningkatkan pelayanan berkualitas yang kemudian mendorong kesukarelaan masyarakat membayar pungutan biaya meski relatif besar dan dari sumbangan masyarakat yang meningkat itu, Pemda DKI Jakarta menaikkan pula besarnya pendapatan aparat, khususnya mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
4. Pemda DKI harus terus bermitra dengan masyarakat dengan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk memberikan informasi apabila terjadi pungutan retribusi diluar ketentuan yang ada. Informasi yang diberikan kepada masyarakat diharapkan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.
5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar lebih cermat dalam memilih obyek lain untuk penelitian, selain DKI Jakarta masih ada daerah-daerah yang memiliki masalah yang kompleks mengenai peningkatan PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah.